

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pembangunan nasional di Indonesia sedang mengalami perkembangan, dengan kondisi seperti itu dibutuhkan pula pendanaan yang cukup besar untuk melakukan kegiatan pembangunan tersebut. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri yang dimaksud adalah hibah dan sumber dana dalam negeri adalah penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak mempunyai peranan strategis dan merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN.

Berdasarkan website <http://www.kemenkeu.go.id> realisasi penerimaan pajak tahun 2014 mencapai Rp 1.143,3 triliun. Jumlah tersebut mencapai 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.246,1 triliun. Sedangkan besar target pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2015 ini sebesar 47,96, namun faktanya realisasi penerimaan pajak triwulan I tahun 2015 untuk pajak penghasilan badan atau pph 25/19 badan mengalami penurunan tertinggi yakni 14,68% atau sebesar Rp 29,639 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 34, 740 triliun. Penerimaan pajak

penghasilan badan merupakan sumber penerimaan pajak terbesar disusul pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah.

Sejak tahun 1984 telah diberlakukan sistem *self assessment* dalam perpajakan Indonesia. Menurut Rahayu (2006:81) sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang dan dibayar melalui Surat Setoran Pajak.

Faktor kesadaran dan kepatuhan wajib pajak memegang peranan penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak, oleh karena itu perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan khususnya penerimaan pajak penghasilan badan. Salah satu ciri dari sistem *self assessment* adalah kesadaran wajib pajak badan dalam mendaftarkan dirinya secara sukarela untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar secara logika akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan. Dan hal itulah yang diharapkan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar maka akan meningkat pula jumlah penerimaan pajak penghasilan. Namun, banyaknya jumlah wajib pajak badan terdaftar belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak penghasilan badan akan selalu meningkat pula, terutama untuk periode-periode berikutnya. Bertambahnya jumlah wajib pajak pasif yang akan menyebabkan menurunnya penerimaan pajak. Tresno *et al* (2011)

Berdasarkan website <http://bisnis.liputan6.com> pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak melakukan kajian dan menemukan fakta bahwa banyak perusahaan yang tidak menyetorkan pajak penghasilan karyawannya atau pph 21 atas karyawannya, dengan adanya kasus tersebut mencerminkan bahwa sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia masih mengalami kekurangan, dimana tidak adanya kesadaran dari perusahaan untuk menyetorkan pajak karyawannya. Tindakan perusahaan tersebut yang secara sengaja tidak menyetorkan pajak karyawan maka termasuk tindakan pidana.

Dalam sistem yang mengutamakan keaktifan Wajib Pajak ini memerlukan sikap kepatuhan dari Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Fakta yang terjadi seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany dalam CNN Indonesia yang mengatakan bahwa menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 terdapat 20 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia, namun berdasarkan analisis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru sekitar 5 juta perusahaan yang wajib membayar pajak, kondisi selanjutnya adalah perusahaan yang bayar dan melapor baru 550 ribu perusahaan atau sekitar 11 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan belum tergali secara maksimal. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sekitar 60 juta tetapi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 28 juta orang. Sementara yang patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baru sekitar 11 juta. Ketidakpatuhan wajib pajak

dan keterbatasan DJP untuk menagih merupakan penyebab tidak tercapainya target penerimaan negara.

Dalam penerimaan pajak saat ini kenyataannya belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha atau perusahaan yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak maksimal. Permasalahan lain adalah masih banyak terdapat kekeliruan yang berasal dari wajib pajak itu sendiri, seperti kurang teliti dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau PPh kurang bayar sehingga penerimaan pajak tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam berita Ortax oleh Aris (2010) pada tahun tersebut, terungkapnya kasus mengenai penunggakan pajak yang dilakukan oleh 100 perusahaan besar yang ada di Indonesia dan 16 diantaranya adalah BUMN. Jumlah tunggakan dari 100 perusahaan tersebut mencapai 17,5 triliun. Melihat kasus tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian tindakan tegas dari aparat perpajakan seperti pemeriksaan dan penagihan pajak sangat dibutuhkan untuk mengurangi penunggak pajak, sehingga penerimaan pajak penghasilan pun akan optimal dan meningkat.

Pemeriksaan pajak membantu meningkatkan kepatuhan formal maupun material Wajib Pajak. Menurut Agusti dan Herawaty (2009) tanpa adanya pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka

ketidakpatuhan Wajib Pajak akan berkembang sehingga bisa mencapai tingkat dimana sistem perpajakan lumpuh.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Kemungkinan yang muncul setelah proses pemeriksaan adalah pertama Wajib Pajak diketahui melakukan lebih bayar dalam pembayaran pajaknya sehingga ditawarkan oleh aparat pajak untuk direstitusi (kembalikan) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atau kemungkinan kedua adalah Wajib Pajak diketahui kurang bayar sehingga akan muncul surat ketetapan yang akan dikeluarkan oleh KPP yaitu Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dalam surat tersebut menunjukkan kekurangan dari pembayaran pajak Wajib Pajak serta sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak. Dengan hal itu kekurangan pajak dari Wajib Pajak akan tertagih dan menambah penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian karena, sistem *self assessment* harus dijalankan dengan kepatuhan dari Wajib Pajak dan hal itu adalah yang dibutuhkan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dibutuhkan upaya

pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak agar Wajib Pajak dapat mematuhi kewajibannya sehingga dapat membayar pajak tepat waktu dan dengan perhitungan pajak yang benar. Dengan hal itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Dan judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh Penerapan Sistem *Self Assessment*, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak terdaftar belum mengindikasikan wajib pajak tersebut aktif seluruhnya.
2. Munculnya fakta pada tahun 2013 bahwa banyak perusahaan yang tidak menyetorkan pajak penghasilan karyawannya.
3. Kecilnya rasio Wajib Pajak Badan yang memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Penerapan sistem *self assessment* memungkinkan munculnya kecurangan sehingga dibutuhkan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak.
5. Banyak terjadi kekeliruan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atau PPh Kurang Bayar.
6. Pengawasan serta Pemeriksaan pajak oleh pemerintah belum maksimal.

7. Munculnya kasus terkait penungakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar dan BUMN di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, terlihat banyak masalah yang muncul ketika mencoba meneliti penerimaan pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah hanya pada penerapan sistem *self assessment* yaitu dilihat dari jumlah Wajib Pajak Badan , jumlah Surat Setoran Pajak, kemudian Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan badan ?
2. Apakah terdapat pengaruh jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap penerimaan pajak penghasilan badan ?
3. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
4. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan sistem *self assessment*, kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Kegunanaan Praktis

- a. Bagi Penulis penelitian ini memperdalam ilmu perpajakan yang telah dipelajari selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- b. Bagi Pemerintah dapat memberikan informasi faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
- c. Sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.